

Bangsawan Jawa dalam Struktur Birokrasi di Majapahit

Ahmad Adaby Darban

I. Pendahuluan

Pandangan kosmogoni yang berasal dari doktrin Hinduisme dan doktrin Budhisme pada dasarnya mempunyai kesamaan bahwa jagad raya ini berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh beberapa wilayah, dan mempunyai titik pusat yang disebut Gunung Meru¹. Pandangan kosmogoni ini berkembang mempengaruhi pola berpikir manusia dan kemudian melahirkan konsep tentang hubungan manusia dengan jagad raya. Konsep hubungan manusia dengan jagad raya ini berpengaruh pula pada aktivitas kehidupan manusia, khususnya pada bidang politik dan kebudayaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir semua kerajaan dan pemerintahan Asia Kuna terpengaruh oleh kosmogoni itu. Gambaran kosmogonis dapat dilihat secara nyata dan merupakan sebuah gambaran dari makro kosmos (jagad raya). Di samping itu, raja dan kerajaan menjadi titik pusatnya.

Konsep kepemimpinan suatu pemerintahan yang dikenal dengan sebutan "Dewa Raja" memandang raja selain sebagai kepala negara juga menganggapnya sebagai keturunan atau wakil dewa; hal ini ternyata telah membudaya di kalangan masyarakat Jawa sejak dahulu kala.² Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan raja didukung oleh suatu predikat *religious magis*, yang kemudian rakyat mempunyai anggapan magis terhadap kekuasaan raja. Anggapan magis itu menyebabkan adanya suatu penghormatan yang sakral dan ketaatan tanpa *reserve* kepada raja. Di samping itu, keturunan raja beserta lingkaran keluarga raja ikut mendapat penghormatan yang sakral dan terjunjung martabatnya sehingga terciptalah sebuah lapisan masyarakat *elite*

yang disebut dengan bangsawan. Raja dan keluarga raja sebagai *mikro kosmos* menjadi titik pusat yang dianggap sakral dalam pandangan masyarakatnya. Anggapan ini terjadi karena lapisan bangsawan itu kemudian mapan menjadi aparat pemerintah dan merupakan raja-raja kecil di daerah serta memperoleh kedudukan dan penghormatan yang tinggi di kalangan masyarakat.

Perangkat kerajaan yang mempunyai nilai penting biasanya dipegang oleh kerabat raja, namun pada perkembangannya ada beberapa perangkat kerajaan yang dijabat bukan dari kerabat raja.

Di dalam suatu kerajaan terdapat dua lapisan masyarakat. Pertama, *lapisan atas* yaitu bangsawan/*wong gedhe* yang sebagian menduduki jabatan sebagai pemerintah; kedua, *lapisan bawah* yaitu rakyat jelata, yang sering disebut dengan *wong cilik* atau *kawulo alit*, lapisan ini adalah lapisan yang diperintah.

Lapisan atas terdiri dari bangsawan keturunan darah raja, bangsawan ini masih dibagi-bagi menurut derajat keturunan, yang masing-masing mempunyai status dan prestise sendiri-sendiri dalam masyarakat. Adapun bangsawan jabatan adalah pejabat-pejabat perangkat pemerintahan yang diangkat oleh raja. Biasanya bangsawan jabatan ini berasal dari lapisan bawah yang mempunyai prestasi sehingga dapat bermobilitas vertikal untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Kedudukan bangsawan jabatan ini biasanya mulai dari patih ke bawah, yaitu aparat operasional, yang menjalankan perintah raja, baik itu yang berada di bidang sipil, militer, maupun keagamaan.

Adapun yang disebut lapisan bawah adalah masyarakat umum yang tidak menjabat dalam pemerintahan. Mereka

berprofesi sebagai pedagang, petani, tukang, buruh, dan lain sebagainya.

II. Struktur Birokrasi Majapahit

Pada abad ke-14 di Jawa terdapat kerajaan besar bernama Majapahit, yang telah memiliki perangkat birokrasi lengkap. Pola pemerintahan Kerajaan Majapahit menganut konsep kosmogoni. Hal

macam lembaga pertimbangan (wan pertimbangan agung), yang jabat oleh 7 orang keluarga Mereka terdiri atas: raja, ayah raja, ibu sang raja, paman sang bibi sang raja, adik sang raja, dan sepupu sang raja.⁴

Jabatan-jabatan di atas diduduki keluarga dekat atau kerabat lingkaran

terdekat dari raja yang menduduki Pejabat-pejabat itu berkedudukan

struktur birokrasi Majapahit memegang otoritas sebagai penjelmaan dewa di samping kekuasaan penguasa daerah dengan kekuasaan penguasa daerah dipergang raja-raja kecil (kepala daerah) dan gelar Paduka Bhattara i atau sering dipanggil Bhra i (Bhre), yang terdiri kerabat raja juga. Jadi, raja kecil kepala daerah dipegang oleh kerabat

dunia. Raja menjadi titik pusat penguasa dan penghambaan rakyat serta mempunyai kharisma yang meluas di kalangan rakyat.

A. Pejabat Kerabat

raja-raja kecil (kepala daerah) dan gelar Paduka Bhattara i atau sering dipanggil Bhra i (Bhre), yang terdiri kerabat raja juga. Jadi, raja kecil kepala daerah dipegang oleh kerabat

berprofesi sebagai pedagang, petani, tukang, buruh, dan lain sebagainya.

II. Struktur Birokrasi Majapahit

Pada abad ke-14 di Jawa terdapat kerajaan besar bernama Majapahit, yang telah memiliki perangkat birokrasi lengkap. Pola pemerintahan Kerajaan Majapahit menganut konsep kosmogoni. Hal ini dapat dimaklumi bahwa di dalamnya terdapat pengaruh dua kekuatan ajaran Hinduisme dan Budhisme. Di dalam struktur pemerintahan Majapahit, raja memegang otoritas tertinggi dan dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia. Raja menjadi titik pusat pemujaan dan penghambaan rakyat serta mempunyai kharisma yang meluas di kalangan rakyat.

A. Pejabat Kerabat

Dalam rangka menegakkan kewibawaan politik dan stabilitas kekuasaan raja, maka raja mengangkat kerabatnya untuk menduduki jabatan yang penting di Kerajaan Majapahit. Jabatan-jabatan yang diduduki oleh kerabat raja, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Setelah kedudukan raja, terdapat jabatan *yuwaraja* atau *kumaraja* adalah jabatan yang diperuntukkan putera atau puteri mahkota, yang kelak dipersiapkan untuk calon raja atau ratu.³ Adapun yang berhak menduduki jabatan ini adalah anak raja yang tertua dari seorang permaisuri.
2. Jabatan *rakyan mahamantri katrini*; jabatan ini semacam *dewan koordinator menteri*, mempunyai kedudukan penting setelah raja dalam hal pemerintahan, mereka menerima perintah secara langsung dari raja. Namun, *rakyan mahamantri katrini* tidak secara langsung merupakan pelaksana perintah itu, tetapi sebagai penerus perintah yang diteruskan kepada bawahannya, yaitu pelaksanaan perintah yang mempunyai jabatan *rakyan mantri ri pakirakiran*. Jabatan *rakyan mahamantri katrini* diduduki oleh saudara raja (adik-adik raja).
3. Jabatan *pahom narendra* atau disebut juga *bhattara sapta prabhu* adalah se-

macam lembaga pertimbangan (dewan pertimbangan agung), yang dijabat oleh 7 orang keluarga raja. Mereka terdiri atas: raja, ayah sang raja, ibu sang raja, paman sang raja, bibi sang raja, adik sang raja, dan adik sepupu sang raja.⁴

Jabatan-jabatan di atas diduduki oleh keluarga dekat atau kerabat lingkaran daerah terdekat dari raja yang memerintah. Pejabat-pejabat itu berkedudukan di pusat kerajaan dan merupakan pemerintahan teras yang bekerja sehari-hari dibantu oleh pejabat-pejabat yang diangkat bukan dari kerabat raja.

Di samping pemerintahan pusat, penguasa-penguasa daerah dipegang oleh raja-raja kecil (kepala daerah) dengan gelar *Paduka Bhattara i* atau sering diucapkan *Bhra i (Bhre)*, yang terdiri dari kerabat raja juga. Jadi, raja kecil atau kepala daerah dipegang oleh kerabat raja sehingga hubungan raja dengan para raja kecil di daerah terjalin dalam bentuk *clientship*, yaitu adanya hubungan ikatan kekeluargaan antara seorang penguasa politik tertinggi dengan orang yang diberi kuasa untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan tertinggi sebagai raja tersebut.⁵ Pola kekuasaan raja-raja kecil merupakan miniatur dari pola pusatnya, termasuk di dalamnya terdapat struktur birokrasi yang sama dan pola serta tata ruang kraton yang sama, namun bentuknya lebih kecil. Di samping itu, sistem kerabat dalam jabatan penting juga dilakukan pada penguasa daerah, dan berstatus sebagai wakil raja Majapahit di daerah yang dikuasai, sebagai kontrol kesetiaan diwajibkan memberikan upeti.

B. Pejabat di Luar Kerabat

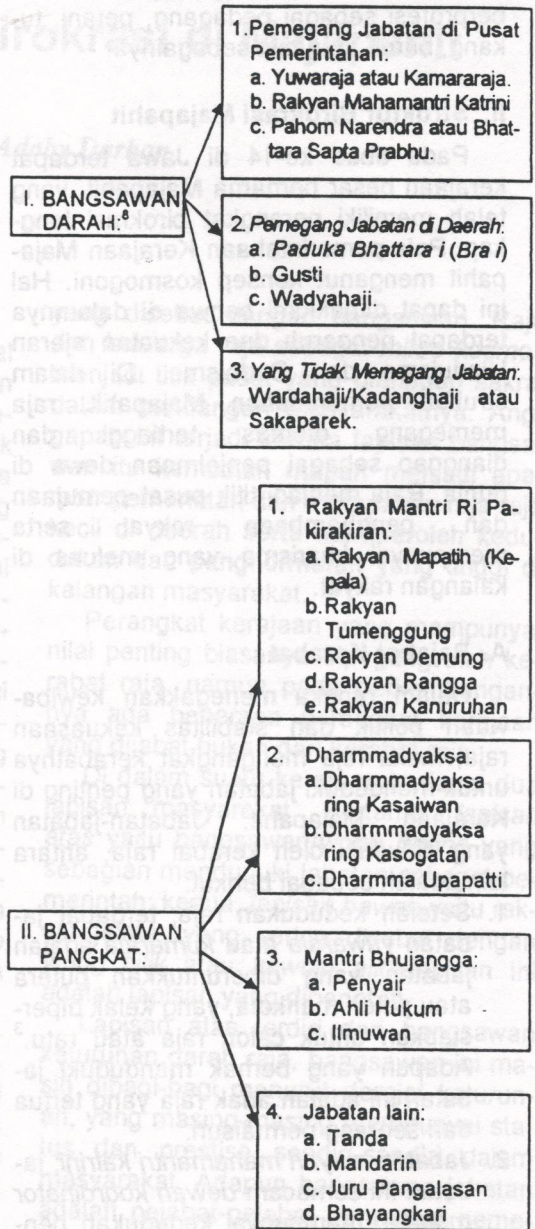
Bila ada bangsawan kerabat raja yang merangkap sebagai pejabat Kerajaan Majapahit, ada pula pejabat Kerajaan Majapahit yang berasal dari luar lingkup kerabat raja. Mereka itu, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. *Rakyan Mantri ri Pakirakiran*, terdiri dari sekelompok pejabat tinggi, seperti *dewan menteri (kabinet)*, yang berfungsi sebagai *badan pelaksana pemerintahan harian*, dipimpin oleh Rak-

yan *Mapatih* atau Patih Hamangku-
bhumi.⁶ Anggotanya terdiri atas Rak-
yan Tumenggung, Rakyen Demung,
Rakyen Rangga, dan Rakyen Kanuru-
han. Sebagai contoh, Gajah Mada
termasuk di dalam badan Rakyen
Mantri ri Pakirakiran. Ia mendapat gel-
lar *Sang Mahamantri Mukya Rakyen
Mapatih*. Di samping itu ada, pemer-
intah harian yang khusus menangani
bidang militer, yang disebut *Juru Pa-
ngalasan*.

2. *Dharmmadyaksa* adalah pejabat tinggi di Majapahit yang bertugas dalam bidang keagamaan dan hukum. Di Kerajaan Majapahit terdapat dua buah *Dharmmadyaksa*, yang pertama *Dharmmadyaksa ring Kasaiwan* bertugas membina kehidupan dan hukum-hukum agama Hindu Syiwa, sedang *Dharmmadyaksa ring Kasogatan* bertugas membina dan menangani bidang hukum serta keagamaan Budha. Dua pejabat keagamaan ini dibantu oleh banyak *Dharma Upapatti*.
3. *Mantri Bhujangga* adalah jabatan untuk kelompok cendekiawan, seperti para ahli hukum, para penyair, dan para ilmuwan yang berada di lingkungan Istana Majapahit.⁷ Mereka berfungsi sebagai penasihat masalah-masalah keilmuwan-keduniawiaan dan memberikan tuntunan rohaniyah.
4. Pejabat-pejabat lain yang ada di Majapahit ialah a) *mantri* atau mandarin; b) para *tanda* (kepala jawatan); c) para gusti; d) *wadyahaji*; e) *bhayangkari*. Jabatan para gusti dan para wadyahaji mempunyai ciri khusus tersendiri. Kedua jabatan itu merupakan jabatan rendahan yang diduduki oleh kerabat raja.

Kesimpulannya, kelas bangsawan atau Priayi Majapahit dapat dibedakan melalui skema sebagai berikut.



Catatan: Bangsawan pangkat di atas berkedudukan di pusat Kerajaan Majapahit, sedangkan struktur yang sama seperti di atas terdapat pada birokrasi raja-raja kecil di daerah. Hanya saja, di belakang jabatan ada kode *i* (kode tambahan *i*) menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pejabat daerah), kemudian diikuti dengan nama daerahnya. Contoh: Rakyen Mapatih *i* Tumapel berarti ia seorang pejabat

patih di daerah Tumapel (Patihnya adalah Kepala Daerah Tumapel atau Paduka Bhattara i Tumapel. Bhra i Tumapel).

III. Struktur Masyarakat Zaman Majapahit

Dalam masyarakat Majapahit terdapat perbedaan yang jelas antara kelas yang berkuasa dengan rakyat kebanyakan. Di samping itu, terdapat perbedaan antara bangsawan darah dan bangsawan pangkat, lingkungan pejabat urusan duniawi dan urusan spiritual. Perlu diperhatikan dalam struktur birokrasi Majapahit, bahwa setiap pejabat sebagai hamba raja sehingga jabatan yang paling tidak penting pun menyebabkan si pemegang jabatan itu memperoleh penghormatan sosial.⁹

Hamba-hamba raja mendapat penghormatan dan mempunyai kewibawaan tersendiri di kalangan masyarakat karena dianggap mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang yang berkuasa. Penghormatan sosial itu diberikan karena dianggap sebagai hadiah atas pengabdianannya kepada keluarga raja. Dapat lebih jelas digambarkan bahwa inti golongan yang memegang kekuasaan adalah pejabat-pejabat di Kerajaan Majapahit, termasuk di dalamnya lingkaran kerabat raja. Anggota keluarga raja mempunyai status tersendiri, yaitu para istri raja, anak-anak raja, dan saudara raja yang sedang memerintah menduduki tempat kedudukan yang utama. Kemudian, baru menyusul sanak saudara dari kerabat-kerabat darah raja, kemudian sanak saudara penguasa-penguasa yang terdahulu. Keluarga bangsawan jabatan memperoleh privilese-privilese sosial, seperti prestise sosial dan pendidikan cara hidup kaum bangsawan. Selanjutnya, mereka dapat diangkat sebagai pejabat-pejabat pemerintah di tingkat bawah. Sanak saudara pejabat bawahan juga secara tidak resmi mendapatkan prestise dari masyarakat. Di Majapahit juga terdapat golongan yang mempunyai kedudukan semiresmi (tidak termasuk dalam birokrasi). Mereka itu para pemuda yang sedang *magang* dan mengikuti latihan-latihan/pendidikan. Para petugas pengumpul pajak tidak

masuk pejabat, namun juga memiliki prestise sosial dalam masyarakat.

Golongan lapisan bawah (*Wong Cilik*) di zaman Majapahit merupakan golongan-golongan sosial di luar kelas yang berkuasa, dengan kata lain golongan yang dikuasai atau yang diperintah. Lapisan bawah ini terdiri atas a) *apinghay* (kaum putih) adalah kaum agamawan pedesaan, yang tugasnya memimpin upacara-upacara keagamaan di desa-desa; b) *anak thani* adalah kaum tani yang mempunyai bidang tanah terbatas dan atau buruh tani; c) *bertya* adalah budak atau pekerja kasar; d) *empu* adalah pembuat peralatan persenjataan, misalnya keris, tombak, dan sebagainya; dan e) lapisan bawah lainnya ialah pedagang, tukang, dan golongan paria.

Golongan *anak thani* dan *bertya* bekerja di dalam kekuasaan bangsawan daerah yang mempunyai tanah (*anden*). Mereka bertempat tinggal bersama bangsawan itu di sebuah desa (*pradesa*). Situasi kehidupannya adalah situasi di lingkungan pedesaan.

Wilayah yang dimiliki oleh para bangsawan daerah (*anden*) itu merupakan komunitas tersendiri yang disebut *Sima*, dengan anak thani dan Bertya merupakan pengikut yang setia kepada bangsawan yang memilikinya. Selain golongan anak thani, ada juga petani yang bebas dari ikatan bangsawan. Petani bebas itu disebut *rama*. Di samping itu, ada juga anggota komunitas biasa yang disebut *dapur*. Dapur merupakan bentuk organisasi teritorial asli yang tertua, dengan penduduknya bernama *kulina*, yaitu para keturunan cikal bakal desa. Baik rama maupun dapur dipimpin oleh kepalanya yang disebut *buyut*.¹⁰ Kehidupan pedesaan (*pradesa*) lebih dekat dengan kebudayaan rakyat bersama tradisi kecilnya. Hal ini mempunyai perbedaan dengan kehidupan kota dengan tradisi besarnya.

Kaum rokhaniawan di luar birokrasi hidup di pedesaan. Mereka hidup sebagai pemimpin upacara keagamaan di pedesaan. Di antara mereka juga ada yang hidup sebagai pertapa dan cendekiawan desa. Rokhaniawan yang hidup sebagai cendekiawan desa sering disebut dengan *resyi* atau *janggan*.

Kaum rokhaniawan ini hidup mengelompok di sekitar wihara, dhama, mandala, sima, dan sebagainya. Kelompok pedagang, tukang, dan empu bertempat tinggal di suatu komunitas tertentu bernama *kalagyan* atau sering disebut juga *kebanyagan*. Daerah itu merupakan *inclave* di pedesaan, yang sedikit banyak terisolasi dari komunitas-komunitas desa tetangganya.¹¹

Golongan terakhir ialah *candala* atau *tutca* dan sering disebut dengan *melecccha*. Golongan ini didiskriminasikan secara sosial, yang di dalam stratifikasi agama Hindu disebut dengan *paria*.¹² Masyarakat juga menamai golongan ini dengan *wong lembah* (orang berstatus terbawah). Mereka berasal dari anak keturunan suku-suku tertua penduduk asli yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan anak keturunan budak tawanan perang.

Dengan melihat gambaran sejarah struktur birokrasi dan sosial Majapahit di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada abad ke-14 di Jawa sudah ada pengelompokan masyarakat, yaitu bangsawan (*wong gedhe* atau kemudian disebut Priayi dan rakyat jelata atau *wong cilik/kawulo alit*. Pada waktu itu belum dikenal penanaman Priayi bagi kelas bangsawan, namun bentuk stratifikasi semacam Priayi rupa-rupanya sudah ada.

Catatan

1. Robert Heine Geldern, "Welt bild und Bauform in Sudostasien", *Weiner Beitrage Zur Kunst un Kulturgeschichte Asiens*, 4, 1930, hlm. 28 - 78.
2. Lihat beberapa sumber sejarah dari historiografi tradisional, contohnya *Kitab Pararaton; Babad Tanah Jawi*.

3. Lihat Prasasti Tribhuānattungadewi Jayavisnuwarddhani, dalam OJO: LXXXIV.
4. N.J. Krom, "Sapta Prabhu", dalam T.B.G., LVI, hlm. 195-196.
5. A. Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial" dalam *Lembaran Sejarah*, No. 4, 1969, hlm. 17.
6. Hasan Djafar, *Girindrawarddhana Beberapa Masalah Majapahit Akhir* (Jakarta, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Dep. P & K, 1978), hlm. 41.
7. *Nagarakertagama*, Canto 83, Stanza 2.
8. Prasasti Renek, 1379 dalam Pegeaud, TH, *Java in Fourteenth Century*, Vol. 3 dan 4, (The Hague, 1960), hlm. 433 - 442.
9. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.* hlm. 20.
10. *Nagarakertagama*, Canto 88, Stanza 1.
11. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 23.
12. T.H. Pegeaud, *Op. Cit.*, hlm. 260.

Daftar Pustaka

- Babad Tanah Jawi*. Alih aksara dan terjemahan Sudibjo Z.H. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980
- Hasan Djafar. *Girindrawarddhana Beberapa Masalah Majapahit Akhir*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Lembaran Sejarah*, No. 4, 1969.
- Nagarakertagama*, canto 83.
- Pararaton*. J. L. A. Brandes and N. J. Krom. Batavia: Albrecht and Co. 1920.
- Pegeud, T.H. *Java in Fourteenth Century*, Vol. 3 and 4. The Hague, 1960.
- T. B. G. LVI
- Weiner Beitrage zur Kunst un Kulturgeschichte Asiens*, 4, 1930.